

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1992.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ahmad Jiwan Dono, *Kedudukan PPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Hukum Tanah Nasional Jilid 1*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Budiman Sinaga, *Hukum Kontrak dan penyelesaian sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- Departemen Agraria, *Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Permen Agraria No. 2 Tahun 2018*, BRNI No. 395 Tahun 2018.
- Djulaeka, *Buku Ajar Perancangan Kontrak*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019.
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2007.
- Effendi Perangin, *Praktik Jual Beli Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Hapusnya Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- H. Salim, HS., *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan "Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian" Buku I*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, 2006.
- K.R.T.M. Tirtodiningrat, *Ihtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Pembangunan, Jakarta, 1966.
- Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, Grafiti Budi Utami, Bandung, 2009.
- Miru Ahmadi, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2002.
- Mustofa, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Karya Media, Yogyakarta, 2010.
- N. Ike Kusmiati, *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar KUHPperdata, dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*, Jurnal ilmu Hukum Litigasi, Vol. 17, No. 1, 2016.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, University Press, Surabaya, 2017.
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 1999.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke-10, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- _____, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976.
- _____, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2010.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2010.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Tata Cara Pengangkatan Pejabat Umum*, Intan Pariwara, Jakarta, 1989.

- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cetakan ke-2, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori Dan Analisa Kasus*, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta, 2004.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat: Prespektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara Press, Malang, 2011.
- Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah; Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Wiryo Prajodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen IV Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah.

C. Sumber Lainnya

- Addien Iftitah, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/6158/5684>; Vol II, No..3 Tahun 2014, diunduh Bulan Desember 2020.
- Christin Sasauw, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, <https://media.neliti.com/media/publications/150176-ID-none.pdf>, Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015, diunduh Bulan Februari 2021.
- Eko Budianto, *Analisis Pasal 51 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006*, <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/download/607/481>, diunduh Bulan Maret 2021.